PENGARUH JUMLAH SPT BADAN DITERIMA, WP BADAN TERDAFTAR DAN WP BADAN EFEKTIF TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

SKRIPSI

Nama : Harie Mulkan
NIM : 22 2012 258

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

PENGARUH JUMLAH SPT BADAN DITERIMA, WP BADAN TERDAFTAR DAN WP BADAN EFEKTIF TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Harie Mulkan
NIM : 22 2012 258

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harie Mulkan

NIM : 22 2012 258

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2016

Penulis

Harie Mulkan

FakultasEkonomidanBisnis
UniversitasMuhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Pengaruh Jumlah SPT Badan Diterima WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
Nama	: Harie Mulkan
NIM	: 22 2012 258
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Perpajakan

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal

Pembimbing,

(Betri Sirajuddin, SE.,Ak.,M.Si.CA)

NIDN/NBM : 0216106902/944806

Mengetahui,

Dekan

u.b. Ketua Program StudiAkuntansi

(Rosalina Ghazali, S.E., Ak.,M.Si)

NIDN/NBM : 0228115802/1021961

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Berusaha, berdoa, semangat, optimis, pasti bisa.*
- *Didunia ini tidak ada yang tidak mungkin selagi kita berusaha untuk mendapatkannya.*
- *"There's a will There's a way" dimana ada kemauan disitu ada jalan.*

(Harie Mulkan)

Terucap syukur pada Allah SWT.

Kupersembahkan untuk :

- *Bapak dan Mama Tercinta*
- *Ayuk dan Adek Tersayang*
- *Sahabat-sahabat PKS Home Secret terbaikku*
- *Pembimbing skripsiku*
- *Almamaterku*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Jumlah SPT Badan Diterima WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak"

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tuaku Muhammad Arief Mulkan dan Hoiriah yang telah mendidik, mendoai, membiayai, menemani dan memberi semangat tak henti-hentinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Betri Sirajuddin,S.E.,AK.,M.Si.CA sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelsaikan skripsi ini, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli,S.E.,MM selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Ibu Rosalina Ghazali,S.E.,Ak,M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri Sirajuddin,S.E.,AK.,M.Si.CA selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan serta memberi saran yang berguna dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan, staf dan karyawan pada Kantor Pelayanan Pratama Palembang Seberang Ulu, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku bapak Muhammad Arief Mulkan dan Mama Hoiriah atas do'a kasih sayang yang berlimpah, semangat dan selalu memberi motivasi yang tak henti-hentinya untuk menjadikan aku manusia yang lebih baik. Terima kasih untuk selalu menjadi penyemangat dalam hidupku.
8. Kepada kakak perempuanku Wira Fatriana dan adikku Muhammad Ferry Kusuma terima kasih telah memberi dorongan semangat dan do'a yang tulus disetiap perjuanganku.
9. Sahabat terbaikku Cahya Hamzah Putra, Reza Anggara dan Zulfikar PKS HOME SECRET terima kasih untuk dukungan nya hingga sampai wisuda sama-sama.

10. Sahabat seperjuangan sekaligus mentor Arini, Riska, Nabila, Dwi, Fitriyanti atas motivasi dan saran-saran hingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan FEB-UMP 2012.
12. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi kalian. Akhirukalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 2016

Penulis

Harie Mulkan

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO v

HALAMAN PRAKATA vi

HALAMAN DAFTAR ISI ix

HALAMAN DAFTAR TABEL xii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR xiii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xiv

ABSTRAK xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 8

A. Penelitian Sebelumnya 8

B. Landasan Teori 12

1. Pemahaman Tentang Pajak 12

a. Pajak 12

b. Fungsi Pajak 12

c. Jenis Pajak 13

d. Sistem Pemungutan Pajak 15

2. Wajib Pajak 15

3. Pajak Penghasilan 18

a. Subjek Pajak Penghasilan 18

b. Objek Pajak Penghasilan 20

4. Tarif Pajak 22

5. Surat Pemberitahuan (SPT) 23

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 23

b. Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan 24

c. Batas Waktu 26

d. Sanksi 26

e. SPT Badan Diterima 28

6. Hipotesis 28

BAB III METODE PENELITIAN 29

A. Jenis Penelitian 29

B. Tempat Penelitian 30

C. Operasionalisasi Variabel 30

D. Data yang Diperlukan 31

E. Metode Pengumpulan Data 32

F. Analisis Data dan Teknik Analisis 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42

A. Hasil Penelitian 42

B. Pembahasan Hasil Penelitian 59

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 71

A. Simpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah SPT Badan, WP Badan dan Realisasi Penerimaan pajak 5

Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya 11

Tabel II.2 Tarif Pajak 23

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel 30

Tabel IV.1 Laporan SPT Badan Diterima 49

Tabel IV.2 Laporan Wajib Pajak Badan Terdaftar 50

Tabel IV.3 Laporan Wajib Pajak Badan Efektif 51

Tabel IV.4 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak 52

Tabel IV.5 Rekapitulasi Variabel Penerimaan 53

Tabel IV.6 Hasil Uji Autokorelasi 56

Tabel IV.7 Hasil Uji Multikolinieritas 57

Tabel IV.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 60

Tabel IV.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi 62

Tabel IV.10 Hasil Uji Secara Parsial (Uji T) 63

Tabel IV.11 Hasil Uji Secara Simultan (Uji F) 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi 45

Gambar IV.2 Uji Normalitas 55

Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas 59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Persetujuan Riset

Lampiran 2 : Surat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek)

Lampiran 3 : Sertifikat TOEFL

Lampiran 4 : Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Lampiran 5 : Biodata Penulis

Lampiran 6 : Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 7 : Data SPSS

ABSTRAK

Harie Mulkan/222012258/2016/ Pengaruh Jumlah SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh jumlah SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif secara parsial dan simultan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah SPT Badan WPiterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif secara parsial dan simultan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplansi yang bersifat asosiatif yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan uji asumsi klasik, Regresi linear berganda, determinasi dan hipotesis. Penelitian ini bermanfaat bagi KPP Pratama Palembang Seberaang Ulu sebagai masukan dan para wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya untuk kemajuan dimasa yang akan datang.

Hasil analisis menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh jumlah SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif secara parsial terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dan tidak adanya pengaruh jumlah SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif secara simultan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

Kata Kunci : SPT, Efektif, Wajib Pajak.

ABSTRACT

Harie Mulkan / 222012258/2016 / The Influences of Total from SPT Firm Accepted, WP Firm Registered, and WP Firm Effective toward Tax Revenues at KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

The problem of the study was how the influences of total from SPT firm Accepted, WP Firm Registered, and WP Firm Effective, partially and simultaneously on Tax Revenues Taxes at KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. The purpose of this study was to find out the influence of the total from SPT firm Accepted. WP Firm Registered, and WP Firm Effective, partially and simultaneously on Tax Revenues Taxes at KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

This study was associative study, based on the level eexplanation that was to determine the relationship between two or more variables. The data used in this study were primary and secondary data. The techniques for collecting the data were interview, documentation, and observation. The technique for analyzing the data was a quantitative analysis by using classic assumption test, multiple linear regression, determination, and hypothesis. This study was useful for the KPP Pratama Seberang Ulu Palembang as input and taxpayers in order to fulfill the tax obligations for future progress.

The results showed that there was no influence of total from SPT Firm Accepted, WP Firm Registered, and WP Firm Effective partially on Tax Revenues and there was no influence of total from SPT Firm Accepted, WP Firm Registered, and WP Firm Effective simultaneously on Tax Revenues

Key words: *SPT, Effectively, taxpayers.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun bidang sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga Negara selaku wajib pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan Negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak. Aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan. Misal jika wajib pajak dapat dianggap patuh.

Adanya perubahan peraturan perpajakan nasional (*Tax Reform*) yang paling mendasar adalah pelaksanaan pemungutan pajak yaitu perubahan dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. Terkait dengan sistem perpajakan di Indonesia. Pajak penghasilan menganut prinsip *Self Assesment System* Wajib Pajak menghitung dan menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Dalam pelaksanaannya sistem ini memerlukan adanya keterbukaan dan kejujuran dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Mulai dari pendaftaran perhitungan besarnya pajak yang terutang, penyetoran, sampai dengan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Fenomena yang seringkali terjadi di masyarakat adalah rendahnya tingkat kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat. tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal misalnya ketidaktahuan mengenai sistem dan aturan perpajakan yang berlaku, atau mungkin ada juga mereka yang masih

belum membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak dapat mengurangi keberhasilan yang seharusnya mereka terima dan sebagainya.

Untuk mencapai target pajak perlu ditumbuhkan selalu kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan.

Banyaknya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh walaupun. Sebenarnya banyak jumlah Wajib Pajak Badan tersebut belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan pajak. Khususnya penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat meningkat. Terutama untuk periode-periode selanjutnya. Logikanya, setiap terjadi penambahan Jumlah Wajib Pajak Badan maka akan diiringi dengan meningkatnya Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan maka akan diiringi dengan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang signifikan. Penambahan Jumlah Wajib Pajak Badan yang seperti inilah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada masa-masa berikutnya.

Dengan berdirinya KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat diharapkan penerimaan yang meningkat dari sektor pajak. Selain itu memberikan pelayanan yang istimewa. Mulai dari pemantauan perkembangan usaha,

konsultasi perpajakan dan penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa yang dilakukan dengan teknologi dan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak itu sendiri.

Sebagaimana umumnya Kantor Pelayanan Pajak dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan menyediakan fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta hak perpajakannya. Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu bentuk pengawasan adalah pengawasan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Massa Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Surat Pemberitahuan merupakan sarana Bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usahanya selama periode waktu tertentu. Selain terhadap kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan (SPT) tidak hanya berfungsi sebagai data melainkan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan Fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan selama waktu tertentu.

Wajib Pajak yang tidak tahu atau terlambat lapor SPT Tahunan / Massa setelah jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Salah satu produk hukum yang akan timbul disini sudah pasti adalah Surat Tagihan Pajak . Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak bersangkutan terdaftar akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak yang berisi denda administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Hal tersebut merupakan salah satu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Setelah sebelumnya diterbitkan Surat Himbauan dan Surat Teguran Kepada Wajib Pajak terdaftar untuk segera menyampaikan SPT Tahunan / Massa mereka.

Berikut ini merupakan data yang terjadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat dilihat dari tabel ini :

Tabel I.1
Jumlah SPT Badan, WP Badan dan Realisasi Penerimaan Pajak

Penerimaan	Tahun		
	2012	2013	2014
SPT Badan Di Terima	851	868	847
WP Badan Terdaftar	3122	3409	3666
WP Badan Efektif	2370	2652	2909
Realisasi Penerimaan Pajak	38.723.491.363	22.144.018.303	25.759.872.343

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2015

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Jumlah SPT Badan Diterima, WP Badan Terdafar dan WP Badan Efektif Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh jumlah SPT Badan diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif secara parsial terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ?
2. Bagaimanakah pengaruh jumlah SPT Badan diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif secara simultan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah SPT Badan diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif secara parsial terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah SPT Badan diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif secara simultan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

   Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman dalam bidang Perpajakan.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memeberikan masukan bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dan para wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Almamater

   Diharapkan dapat memberikan maasukan bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa jurusan akuntansi dan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tresno Indra dan Wulan (2011) dengan judul Pengaruh penerimaan wajib pajak badan penyampaian SPT Masa, PPH Badan, dan Pengawasan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jakarta Matraman. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penambahan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jakarta Matraman.Bagaimana pengaruh terbitnya surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jakarta Matraman. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan berupa pengambilan data yang telah direkap dan dikeluarkan, analisis data yang digunakan adalah kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada KPP Pratama Jakarta Matraman mengenai pengaruh pengawasan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak penghasilan badan serta di ukung oleh teori yang telah penulis peajari dan hasil pembahasan penelitian. Hal ini dapat dinilai dari t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} dan nilai signifikannya lebih kecil daripada tingkkat signifikan yang digunakan (0,05) yang artinya penambahan jumlah wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal

ini menunjukkan bahwa dengan semakin besar jumlah penerimaan PPh badan begitu pula sebaliknya.

Perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini terletak pada persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada jenis penelitiannya yaitu Penelitian asosiatif, sedangkan perbedaannya terletak pada judul yaitu Pengaruh Jumlah SPT Badan Diterima, WP Badan terdaftar dan WP Badan Efektif Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam merespon surat himbauan terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan Studi pada KPP Pratama Batu, yang dilakukan oleh Eviany, Sri dan Amarudi Jauhari (2014). Perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini terletak pada persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada surat penerimaan SPT sedangkan perbedaannya terletak pada judul yaitu Pengaruh Jumlah SPT Badan Diterima, WP Badan terdaftar dan WP Badan Efektif Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Penelitian sebelumnya berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Jakarta yang dilakukan oleh Euphrasia (2010). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepatuhan WP, Pemeriksaan pajak

penghasilan terutang terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dari data yang terkumpul dan telah uji asumsi klasik diperoleh hasil bahwa data layak untuk dianalisis dalam model regresi. Terlihat bahwa nilai signfikan sebesar 3,7% yang berada di bawah nilai 5% menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

Perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini terletak pada persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada indikator sama-sama wajib pajak badan dan pada penerimaan pajak sedangkan perbedaannya terletak pada judul yaitu Pengaruh Jumlah SPT Badan Diterima, WP Badan terdaftar dan WP Badan Efektif Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Tahun, dan Nama penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Pengaruh penerimaan wajib pajak badan penyampaian SPT Masa, PPH Badan, dan Pengawasan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jakarta Matraman (Tresno Indra dan Wulan, 2011).	**Persamaan:** Terletak pada jenis penelitiannya yaitu Penelitian asosiatif. **Perbedaan:** Terletak pada judul,dan metode pengumpulan data yang digunakan analisis kuantitatif sedangkan sekarang analisis kualitatif.Dan
2	Analisis Faktor-Faktor yang mempengruhi wajib pajak dalam merespon surat himbauan terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan Studi pada KPP Pratama Batu (Eviany, Sri dan Amarudi Jauhari 2014).	**Persamaan:** Terletak pada indikator sama SPT. **Perbrdaan:** Terletak pada Judul serta variabel
3	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Euphrasia Susy Suhendra 2010)	**Persamaan:** Terletak pada indikator dan Penerimaan pajak. **Perbedaan:** Tehnik pengumpulan data dan judulnya

Sumber: Penulis, 2016

B. Landasan Teori

1. Pemahaman Tentang Pajak

a. Pajak

Definisi pajak yang kemukakan oleh Soemitro, (dalam Herry, 2010: 7) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksi yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama utuk membiayai *public investment.*

b. Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya,secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Penerimaan *(Budgetary)*Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur *(Regulatory)*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yangtinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia Mardiasmo(2009:1).

c. Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak, yang dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu:

1) Menurut golongannya, pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak langsung

Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b) Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga

2) Menurut sifatnya, pajak dikelompokan menjadi dua,yaitu:

a) Pajak subjektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjektif.

b) Pajak objektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik pada berupa denda, keadaan-keadaan atau peristiwa yang timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tinggal.

3) Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Negara (pajak pusat)

Adalah yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

b) Pajak daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. (Siti. 2009: 7-9).

d. Sistem Pemungutan Pajak

dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1) *Official assessment system*

   Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang aperatur perpajakanuntuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2) *Self assessment system*

   Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

3) *With holding system*

   Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. (Siti,2009: 11).

2. Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan wajib pajak adalah :

"Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jenis wajib pajak ada tiga jenis, yaitu:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi

   Adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2) Wajib Pajak Badan

   Adalah Wajib Pajak badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

a. Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE- menyulitkan administrasi maka perlu diberikan penegasan bahwa 01/PJ9/2004, sebagaimana diketahui banyak wajib pajak terdaftar tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan antara lain non aktif, bubar dan meninggal dunia dan sebagainya dan dari kenyataan tersebut diatas telah timbul beberapa istilah seperti Wajib Pajak Aktif, Wajib Pajak Efektif, Wajib Pajak Non Aktif dan Wajib Pajak Non Efektif serta

karantina yang dapat membingungkan petugas pelaksanaan dilapangan. Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat administrrasi pajak hanya mengenai istilah-istilah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif dengan pengertian sebagai berikut:

1) Yang dimaksud wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan sebagaimana mestinya.
2) Yang dimaksud wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau SPT Tahunan.

   Sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-01/PJ.9/2004 Wajib Pajak Non Efektif :

   1) Wajib Pajak yang berturut-turut selama 2 (dua) tahun tidak memasukan SPT PPH.
   2) Wajib Pajak yang sudah meninggal dunia/bubar, tetapi belum ada surat keterangan reminya.
   3) Wajib Pajak tidak ditemukan alamatnya, walaupun sudah diusahakan pencarian oleh Dina Luar.
   4) Wajib Pajak secara nyata tidak menunjukan kegiatan usaha

   Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari pemenuhan dan penyampaian

SPT Masa atau SPT Tahunan, sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari tidak dipenuhinya kewajiban menyampakan SPT Masa atau SPT Tahunan tersebut.

1) **Wajib Pajak Badan Terdaftar**

   Adalah Wajib Pajak badan yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak sampai tanggal 31 Desember.

2) **Wajib Pajak Badan Efektif**

   Adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari pemenuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

3. Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

a. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penhasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Siti,2009: 81).

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008, Subjek Pajak diklasifikasikan menurut jenisnya, Sebagai berikut:

1) Subjek Pajak orang pribadi

   Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia.

2) Subjek Pajak warisan

   Subjek warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak itu adalah ahli waris.

3) Subjek Pajak Badan

   Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan milik daerah dengan nama apapun, dan usaha tetap.

4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap

   Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, oroang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Objek Pajak Penghasilan adalah

"Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, membedakan tiga macam Penghasilan:

1) Objek Pajak Penghasilan yang dipakai pajak secara umum (pasal 4 ayat 1), yaitu:
   a) Penggantian ataun imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
   b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

c) Laba Usaha.

d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengaihan harta.

e) Penerimaan kembali pembayaran pajaka yang telah diberikan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uag.

g) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha.

h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

i) Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta.

j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

m)Selisih lebih karena penilain kembali aktiva.

n) Premi asuransi.

o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2) Objek Pajak Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final (pasal 4 ayat 2), yaitu:

Atas penghasilan berupa deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3) Objek Pajak Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak (pasal 4 ayat 3), yaitu:

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah bangunan sumbangan termasuk zakat, harta hibah, warisan, dan lain sebagainya.

4. Tarif Pajak

Ketentuan yang mengatur tentang tarif umum adalah pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut :

Tabel II.2
Tarif Pajak Orang Pribadi

Laporan Penghasilan Kena pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Tabel II.3
Tarif Pajak Badan

Laporan Penghasilan Kena pajak	Tarif
Kurang dari Rp 4.800.000.000	1%
Diatas Rp 50.000.000.000	25%

Sumber : UU RI No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1)

5. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah: "Surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan"

b. Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan

Soemarso. S.R. (2007:51) Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau suatu saat. SPT Masa terdiri atas:

a) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21

SPT ini diguanakan oleh pemberi kerja untuk melaporkan pajak penghasilan karyawan, pension atau penerima honorarium yang telah dipotong dan disetorkan ke kas Negara selama masa pajak.

b) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22,23 dan 26

SPT ini digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan pihak lain yang telah dipotong dan disetorkan ke kas Negara.

c) Surat Pembeitahuan Masa PPh Pasal 25

SPT ini digunakan untuk melaporkan angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk suatu masa pajak.

d) Surat Pemberitahuan Masa PPN/PPnBM

SPT ini digunakan untuk melaporkan pajak keluaran yang dipungut, pajak masukan yang dibayar serta kekurangan atau kelebihan bayar pajak.

2) Surat Pemberitahuan Tahunan

Adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran, pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, SPT Tahunan terdiri atas :

a) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21

SPT ini digunakan untuk melaporkan perhitungan kembali pajak penghasilan karyawan, pensiunan, dan penerima honorarium yang terutang untuk seluruh tahun serta jumlah yang telah dipotong dan disetorkan ke kas Negara dan kekurangan/kelebihan bayar pajak akhir tahun.

b) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh – Wajib Pajak Orang Pribadi.

SPT ini merupakan perhitungan pajak penghasilan wajib pajak perseorangan yang terutang dalam suatu tahun serta pelunasan yang telah dilakukan dalam tahun berjalan untuk mengetahui kekurangan/kelebihan bayar pajak pada akhir tahun.

c) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh – Wajib Pajak Badan

SPT ini merupakan perhitungan pajak penghasilan wajib pajak badan yang terutang dalam suatu tahun serta pelunasan yang

telah dilakukan dalam tahun berjalan untuk mengetahui kekurangan/kelebihan bayar pajak pada akhir tahun..

c. Batas Waktu

Soemarso.S.R (2007:54) Surat Pemberitahuan Tahunan harus disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah satu tahun takwin atau satu tahun buku. Apabila tahun buku wajib pajak sama dengan tahun takwin (1 januari –31 desember) maka batas waktu penyampaian SPT adalah 31 maret tahun berikutnya. Tetapi, apabila tahun buku wajib pajak tidak mengikuti tahun takwin (misalnya 1 juni – 31 mei) maka batas waktu penyampaian adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun buku (31 agustus).

d. Sanksi

Soemarso.S.R (2007:54), sanksi-sanksi yang berkenan dengan Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut :

1) SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetukan dikenakan sanksi beryang ditetukan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 50.000 untuk SPT Masa dan Rp 100.000 untuk SPT Tahunan (Pasal 17).
2) Sanksi pidana berupan kurungan selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali jumlah pajak terutang

akan dikenakan kepada wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara.

3) Jika hal yang disebutkan dalam butir 2 tersebut diatas dilakukan dengan sengaja maka sanksi pidana yang dikenakan adalah pidana penjaraselama-lamanya 6 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 4 kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau tidak dibayar.
4) Jika berdasarkan penelitian kantor pajak dalam SPT terdapat kesalahan hitung atau salah tulis akan dikeluarkan surat tagihan pajak dengan sanksi bunga 2% sebunga 2% sebulan maksimum 24 bulan.
5) Jika SPT tidak disampaikan dan oleh karena itu kantor pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak terutang kurang bayar, maka akan dikenakan sanksi berikut ini:
   a) 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
   b) 100% dari pajak penghasilan yang tidak dipotong.
   c) 100% dari pajak pertambahan nilai atau pajak atau penjualan serta barang mewah yang tidak atau kurang bayar.

e. SPT Badan Diterima

Adalah SPT Tahunan yang dilaporan setiap tahunnya dan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Setempat..

6 . Hipotesis

Sesuai dengan masalah yang dihadapi dan tujuan yang diinginkan, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H_1 = Terdapat Pengaruh jumlah SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif Secara Parsial terhadap Realisasi Penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

H_2 = Terdapat Pengaruh jumlah SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif Secara Simultan terhadap Realisasi Penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasinya dibagi menjadi tiga macam (Sugiyono, 2012: 55):

1) Penelitian Deskriftif

Penelitian deskriftif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel satu atau lebih tanpa membandingkan dengan variabel lain.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan satu atau lebih tetapi untuk sampel yang lebih dari satu.

3) Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang berhubungan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, yang beralamatkan Jl. Jend. Ahmad Yani No.59, 14 Ulu, Palembang, 30264, Telp: 0711-513393, Fax: 0711-513392

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No	Sub Variabel	Definisi	Indikator
1	SPT Badan Diterima(X1)	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dilaporkan setiap tahunnya dan diterimaoleh kantor pelayanan pajak setempat.	Laporan SPT Badan Diterima tahun 2012 s/d 2014.
	Wajib Pajak Badan Terdaftar (X2)	Wajib Pajak Badan Terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan 31 Desember.	Laporan Wajib Pajak Badan Terdaftar tahun 2012 s/d 2014.
	Wajib Pajak Badan Efektif (X3)	Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari pemenuhan peyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.	Laporan Wajib Pajak Badan Efektif tahun 2012 s/d 2014
2	Realisasi Penerimaan Pajak (Y)	Hasil yang telah diperoleh kantor pelayanan pajak tiap tahun dari wajib pajak.	Laporan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2012 s/d 2014.

Sumber: Penulis, 2016

D. Data yang Diperlukan

Data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi dua (Husein,2011: 42):

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan bak oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. data primer yaitu penulis mengambil data langsung dari tempat penelitian tanpa melalui perantara yaitu wawancara wawancara pada pegawai KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Sedangkan data sekunder berupa jumlah SPT badan diterima, jumlah wajib pajak badan dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2012-2014 dan gambaran umum KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

E. Metode Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut (Sugiyono, 2012: 194):

1) Interview (wawancara)

Interview adalah teknik pengumpulan data dalam periode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

2) Kuesioner (angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3) Observasi

Observasi adalah pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang terdahulu. Dokumentasi ini biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan indikator-indikator yang digunakan.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2009: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat di kelompokan menjadi 2, yaitu:

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif berupa tabel SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2012 s/d 2014. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis statistik.

2. Teknik Analisis

a. Uji asumsi klasik

1. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam pengujian ini terdapat dua cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan analisis grafik *(normal P-P plot)* dan analisis statistik *(One Sample Kolmogorov-Smirnov Test)*. Dalam melakukan pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan *Normal P-P plot.* Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas yaitu:

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

2) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel itu sendiri. Pengujian ini menggunakan model uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan jika Durbin Watson (DW) berkisar antara -2 sampai +2 menunjukan tidak terjadi autokorelasi.

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji Mulitkolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas *(independent variable)*. Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor VIF)* (Sumanto, 2014: 165)

Melihat nilai Tolerance :

a) Tidak terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih besar 0,10.
b) Terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10.

Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) :

a) Tidak terjadi Multikolinearitas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00.
b) Terjadi Multikolinearitas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00.

4) Uji Heteroskedastisitas

uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan uji *scatter plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian heteroskedastisitas dengan melihat *scatter plot* yaitu (Santoso, 2012:240):

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas
b) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen (X_1, X_2, X_3) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen

mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi analisis regresi linear berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua). Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut (Sugiyono.2013: 277):

$$Y = a + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak

a = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi SPT Badan Diterima

b_2 = Koefisien regresi Wajib Pajak Badan Terdaftar

b_3 = Koefisien regresi Wajib Pajak Badan Efektif

X_1 = SPT Badan Diterima

X_2 = Wajib Pajak Badan Terdaftar

X_3 = Wajib Pajak Badan Efektif

e = Error

c. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau presentasi total varians dalam variabel terkait yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah nilai *R Square*. Namun apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*. Hasil perhitungan *Adjusted* R^2 dapat dilihat pada output *mode summary*. Pada kolom *Adjusted* R^2 dapat diketahui berapa presentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelatian.

d. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, maka perlu dilakukan pengujian atas hipotesis tersebut dengan uji sebagai berikut (Sugiyono,2013: 93):

1) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan X_1 atau X_2 yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial yaitu:

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

$X_{01.1}$: Tidak terdapat pengaruh SPT Badan Diterima terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

$X_{a1.1}$: Terdapat pengaruh SPT Badan Diterima terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

$X_{01.2}$: Tidak terdapat pengaruh Wajib Pajak Badan Terdaftar terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

$X_{a1.2}$: Terdapat pengaruh Wajib Pajak Badan Terdaftar terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

$X_{01.3}$: Tidak terdapat pengaruh Wajib Pajak Badan Efektif terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

$X_{a1.3}$: Terdapat pengaruh Wajib Pajak Badan Efektif terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

b) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = n-k-l, taraf nyata (α) berarti nilai t_{tabel}, taraf nyata dari F_{tabel} ditentukan dengan derajat bebas (db) = n-k-l.

c) H_o ditolak dan H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ Berdasarkan probabilitas H_o ditolak jika $P_{value} < 5\%$, H_a diterima jika $P_{value} > 5\%$.

d) Kesimpulan

2) Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji f)

Pengujian hipotesis secara simultan merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan X_1 atau X_2 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara simultan yaitu:

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_{O2}: Tidak Terdapat pengaruh Positif dan signifikan Jumlah SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif terhadap realisasi penerimaan pajak.

H_{a2}: Terdapat Pengaruh positif dan signifikan Jumlah SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif terhadap realisasi penerimaan pajak.

b) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = n-k-l, taraf nyata (α) berarti nilai $f_{tabel,}$ taraf nyata dari F_{tabel} ditentukan dengan derajat bebas (db) = n-k-l.

c) H_o ditolak dan H_a diterima apabila $f_{hitung} > f_{tabel,}$ dan dengan tingkat signifikasi < 0,05.

d) Kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan salah satu dari tiga Kantor Pelayanan Pajak yang ada di kota Palembang. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan unit unit vertikal dibawah kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Memiliki wilayah kerja meliputi empat kecamatan yaitu Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Plaju, dan Kertapati.

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu didirikan dan resmi beroperasi pada tanggal 9 september 2008 berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan salah satu dari tiga pelayanan pajak yang ada di kota Palembang. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan unit vertikal dibawah kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Memiliki wilayah kerja meliputi empat kecamatan yaitu Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Plaju, dan Kertapati.

a. Visi dan Misi

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu memiliki Visi dan Misi yang berhak dicapai. Visi dan Misi tersebut mengacu kepada visi, misi dan Direktorat Jenderal Pajak karena Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel adalah unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak. Visi, Misi dan nilai tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Visi Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2) Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menghimpun pemerintah pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

a) Bidang Fiskal

Menghimpun penerimaan Negara dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan degan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

3) Bidang Ekonomi

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang dapat menimasi distoris.

4) Bidang Politik

Mendukung Proses demokratisasi di segala bidang pemerintah.

5) Bidang Kelembagaan DJP

Senantiasa memperbahrui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

b. Struktur Organisasi

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perusahaan yang terkoordinasi dengan baik sangat dibutuhkan adanya struktur organisasi yang dapat menggambarkan tentang pembagian tugas dan pemisahan fungsi yang jelas dan terarah, serta dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian sesuai dengan tugas yang diberikan.

Struktur organisasi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dapat dilihat dari struktur organisasinya yang mempunyai ciri-ciri, yaitu: organisasinya besar, jumlah karyawannya banyak, spesifikasi kerja tinggi, dan garis kekuasaan mengalir secara langsung dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu kepada Kasubag Bagian Umum, Kasi Pengolahan dan Informasi, Kasi Pelayanan, Kasi Penagihan, Kasi Pemeriksaan, Kasi Ekstensifikasi dan Kasi Waskon 1 - 4.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dapat dilihat pada gambar IV.1 berikut ini:

Gambar IV.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

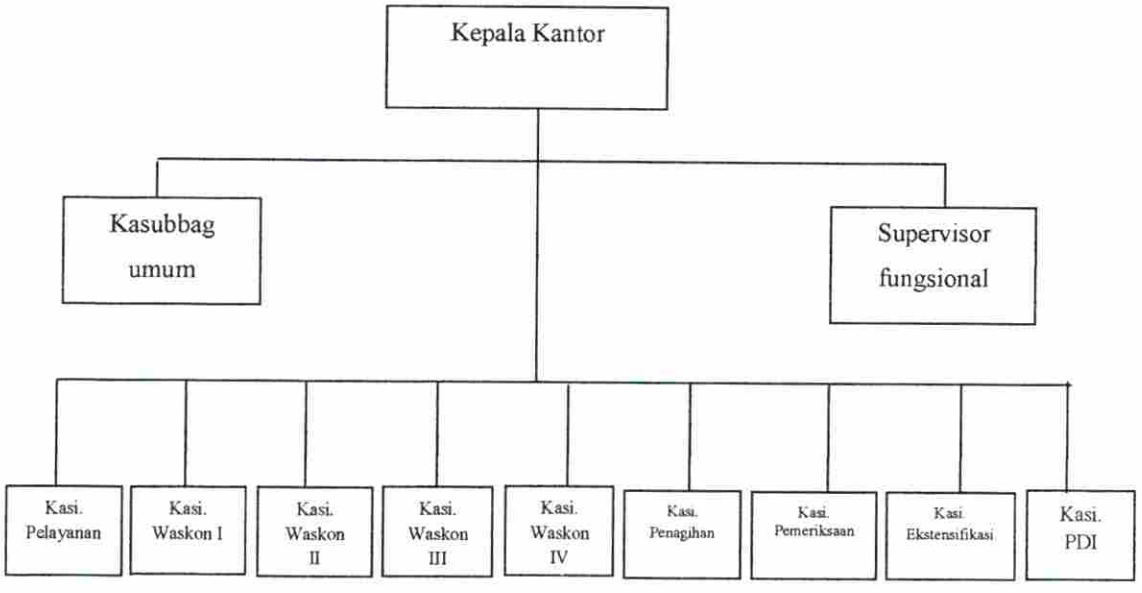

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu adalah menata dan Mengadministrasikan perpajakan, serta mengamanakan penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu terdiri dari beberapa seksi yang menunjang tugas pokok tersebut.

Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yaitu sebagai berikut:

1) Kepala Kantor

Kepala kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsug Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Kepala Sub Bagian Umum

Membantu menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

3) Kepala Seksi Pelayanan

Membantu Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan regestrasi Wajib Pajak serta kerjasama perpajakan, pelaksanaan regrestrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen

perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling dan penyiapan laporan kinerja.

5) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak Lainnya), bimbingan /himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan, Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasanya didasarkan pada cakupan wilayah (teritorial) tertentu.

6) Kepala Seksi Ekstensifikasi

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai,

maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Selain pemberian NPWP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, diberikan pula kepada Wajib Pajak Badan dan Bendaharawan Pemerintah, termasuk juga dalam kegiatan ini adalah Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengertian Ekstensifikasi menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Kegiatan Ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

7) Kepala Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

8) Kepala Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

2. Deskripsi Variabel

a. Laporan SPT Badan Diterima (X_1) Tahun 2012 s/d 2014

Tabel IV.1
Surat Pemberitahuan Badan Diterima
Tahun 2012 s/d 2014

NO	Bulan	2012	2013	2014
1	Januari	8	9	7
2	Febuari	40	50	39
3	Maret	169	125	121
4	April	551	581	559
5	Mei	23	34	26
6	Juni	12	14	20
7	Juli	8	17	11
8	Agustus	6	5	7
9	September	6	3	17
10	Oktober	15	8	10
11	Nopember	3	11	13
12	Desember	10	11	17
	Grand Total	**851**	**868**	**847**

Sumber: Data yang telah diolah

Penerapan *Self Assessment System* yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang ulu, dari tahun 2012 sampai dengan tahun

2014 sudah berjalan namun kurang efektif ini bisa dilihat dari tabel IV.1 dimana terjadinya kenaikan SPT Badan diterima. Tetapi pada Tahun 2013 s/d 2014 terjadi penurunan. Ini diakibatkan masih banyak Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Badan Diterima tepat pada waktunya. Untuk itu Disarankan bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu hendaknya membantu dalam menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan pajak sehingga Wajib Pajak yang terdaftar bisa tepat waktu dalam menyampaikan SPTnya.

b. Laporan Wajib Pajak Badan Terdaftar (X_2) Tahun 2012 s/d 2014

Tabel IV.2
Wajib Pajak Badan Terdaftar
Tahun 2012 / 2014

NO	Bulan	2012	2013	2014
1	Januari	299	342	322
2	Febuari	249	257	304
3	Maret	229	298	312
4	April	258	312	310
5	Mei	246	256	298
6	Juni	246	210	256
7	Juli	225	246	277
8	Agustus	215	257	293
9	September	254	298	301
10	Oktober	294	315	326
11	Nopember	357	340	355
12	Desember	250	278	312
	Grand Total	**3122**	**3409**	**3666**

Sumber: Data yang telah diolah

Penerapan *Self Assessment System* yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang ulu, dari tahun 2012 sampai dengan tahun

2014 sudah berjalan efektif ini bisa dilihat dari tabel IV.2 dimana terjadi penigkatan. Ini disebabkan oleh, tingkat kesadaran masyarakat tehadap pajak sudah ada. Untuk itu disarankan bagi Kantor Pelayanan Pajak hendaknya membantu dalam mensosialisasikan pentingnya pajak bagi pembangunan Negara. Dengan diadakannya sosialisasi tersebut diharapkan kesadaran masyarakat akan timbul dan masyarakat setempat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan Terfdaftar bisa secepatnya mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Badan Terdaftar.

c. Laporan Wajib Pajak Badan Efektif (X_3) Tahun 2012 s/d 2014

Tabel IV.3
Wajib Pajak Badan Efektif
Tahun 2012 / 2014

NO	Bulan	2012	2013	2014
1	Januari	207	248	249
2	Febuari	169	205	209
3	Maret	153	171	234
4	April	217	244	251
5	Mei	185	230	236
6	Juni	169	183	213
7	Juli	176	187	247
8	Agustus	162	177	253
9	September	226	220	225
10	Oktober	240	258	315
11	Nopember	272	289	223
12	Desember	194	240	254
	Grand Total	**2370**	**2652**	**2909**

Sumber: Data yang telah diolah

Penerapan *Self Assessment System* yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang ulu, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sudah berjalan efektif ini bisa dilihat dari tabel IV.3 dimana terjadinya kenaikan. Salah satu jalan yang ditempuh agar Wajib Pajak Badan Efektif dapat bertambah adalah dengan perluasan basis pajak yang dilakukan melalui sosialisasi secara intensif ke berbagai pihak dan dilakukanya penjaringan Wajib Pajak Badan Efektif melalui kegiatan-kegiatan tertentu.

d. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak (Y) Tahun 2012 s/d 2014

Tabel IV.4
Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2012 / 2014

NO	Bulan	2012	2013	2014
1	Januari	Rp 3.102.893.981	Rp 128.057.370	Rp 113.476.932
2	Febuari	Rp 3.112.354.618	Rp 2.753.820.445	Rp 833.987.820
3	Maret	Rp 5.565.170.699	Rp 2.691.278.716	Rp 848.327.148
4	April	Rp 3.160.481.836	Rp 3.252.517.038	Rp 2.870.494.119
5	Mei	Rp 2.610.297.700	Rp 198.646.543	Rp 690.823.821
6	Juni	Rp 2.599.572.533	Rp 188.095.821	Rp 2.205.869.739
7	Juli	Rp 2.633.101.297	Rp 281.266.141	Rp 2.119.181.390
8	Agustus	Rp 369.466.886	Rp 2.521.242.253	Rp 2.068.002.388
9	September	Rp 5.101.434.361	Rp 2.565.139.902	Rp 2.261.607.491
10	Oktober	Rp 2.649.102.119	Rp 2.524.544.952	Rp 2.121.008.221
11	Nopember	Rp 2.683.023.795	Rp 2.481.641.277	Rp 2.075.846.120
12	Desember	Rp 5.136.591.558	Rp 2.557.767.845	Rp 7.551.247.154
	Grand Total	**Rp 38.723.491.363**	**Rp 22.144.018.303**	**Rp 25.759.872.343**

Sumber: Data yang telah diolah

Tingkat Realisasi Penerimaan Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014

terdapat penurunan Realisasi Penerimaan Pajak Badan ini dikarenakan masih belum optimalnya Penerimaan Pajak yang diterima Kantor Pelayanan Pajak.

Tabel IV.5
Rekapitulasi Variabel Penerimaan
Tahun 2012 / 2014

Tahun	Bulan	X_1	X_2	X_3	Y
2012	1	8	299	207	3.102.893.981
	2	40	249	169	3.112.354.618
	3	169	229	153	5.565.170.699
	4	551	258	217	3.160.481.836
	5	23	246	185	2.610.297.700
	6	12	246	169	2.559.572.533
	7	8	225	176	2.633.101.297
	8	6	215	162	369.466.886
	9	6	254	226	5.101.434.361
	10	15	294	240	2.649.102.119
	11	3	357	272	2.683.023.795
	12	10	250	194	5.136.591.558
2013	1	9	342	248	128.057.370
	2	50	257	205	2.753.820.445
	3	125	298	171	2.691.278.716
	4	581	312	244	3.252.517.038
	5	34	256	230	198.646.543
	6	14	210	183	188.095.821
	7	17	246	187	281.266.141
	8	5	257	177	2.521.242.253
	9	3	298	220	2.565.139.902
	10	8	315	258	2.524.544.952
	11	11	340	289	2.481.641.277
	12	11	278	240	2.557.767.845
2014	1	7	322	249	113.476.932
	2	39	304	209	833.987.820
	3	121	312	234	848.327.148
	4	559	310	251	2.870.494.119
	5	26	298	236	690.823.821

	6	20	256	213	2.205.869.739
	7	11	277	247	2.119.181.390
	8	7	293	253	2.068.002.388
	9	17	301	225	2.261.607.491
	10	10	326	315	2.121.008.221
	11	13	355	223	2.075.846.120
	12	17	312	254	7.551.247.154
TOTAL	**36**				

Sumber: Data yang telah diolah

3. Hasil Uji Data

Sebelum menentukan pengaruh jumlah spt badan diterima wp badan terdaftar dan wp badan efektif terhadap realisasi penerimaan pajak. Terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap data yang diperoleh. Pengujian yang dilakukan terdiri dari uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda. Koefisien determinasi dan uji hipotesis.

a. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji asumsi klasiknya yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik yang bebas dari normalitas autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas untuk penelitian ini

menggunakan analisis grafik normal. Pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan analisis grafik normal P-$P_{plot.}$

Uji normal P-$P_{plot,}$ jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pada distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar IV.2 sebagai berikut:

Gambar IV.2
Hasil Pengujian Normalitas.

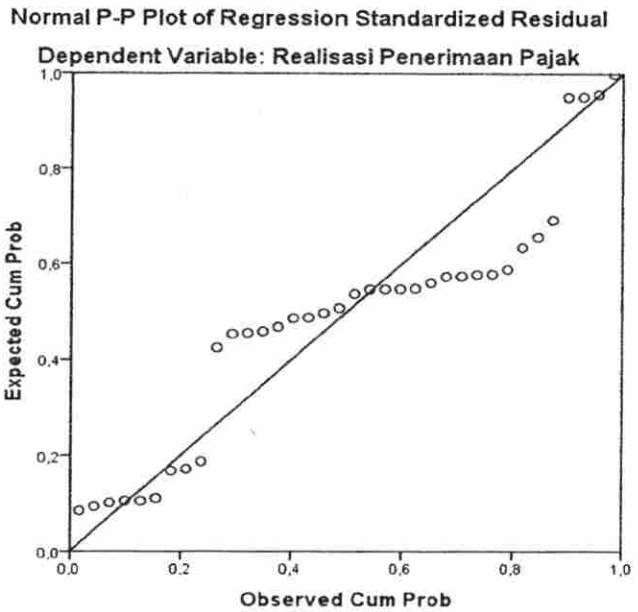

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan gambar IV.2 diatas dapat disimpulkan bahwa grafik normal *P-P plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah diagonal, maka grafik menunjukan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi klasik.

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yang nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel ini sendiri. Pengujian ini menggunakan model uji Durbin Watson (DW). Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung autokorelasi. Uji Durbin Watson (DW) pada peneltian ini dibantu dengan SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,174[a]	,030	,061	1664354377	1,486

a. Predictors: (Constant), WP Badan Efektif, WP Badan Terdaftar, SPT Badan Diterima

b. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.6 diatas nilai Durbin Watson (DW) pada penelitian ini yaitu sebesar 1,486 yang berarti nilai tersebut berada di antara -2 sampai +2. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitia ini tidak mengandung autokorelasi.

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji Mulitkolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi variabel bebas *(Independent Variable)*. Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor VIF)*. Tidak terjadi Multikolinieritas, jika nilai tolerance lebih besar 0,10 dan jika nilai VIF lebih kecil 10,0. Uji multikolinieritas penelitian ini dibantu dengan SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.7
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

del	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2965387343,913	2033991160,769		1,458	,155		
SPT Badan diterima	1733599,530	1818080,697	,166	,954	,347	,997	1,003
WP Badan Terdaftar	2098973,754	10786933,039	,052	,195	,847	,430	2,327
WP Badan Efektif	397270,664	11397762,344	,009	,035	,972	,429	2,329

)ependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak
ıber: Hasil Pengolahan Data,2016

Berdasarkan tabel IV.7 diatas nilai tolerance tiap variabel lebih besar 0,10 dan nilai VIF lebih kecil 10,0. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam peneltian ini.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan uji *scatter plat.* Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian heteroskedastisitas dengan melihat *scatter plot* yaitu :

a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk sebuah pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas
b. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar IV.3
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

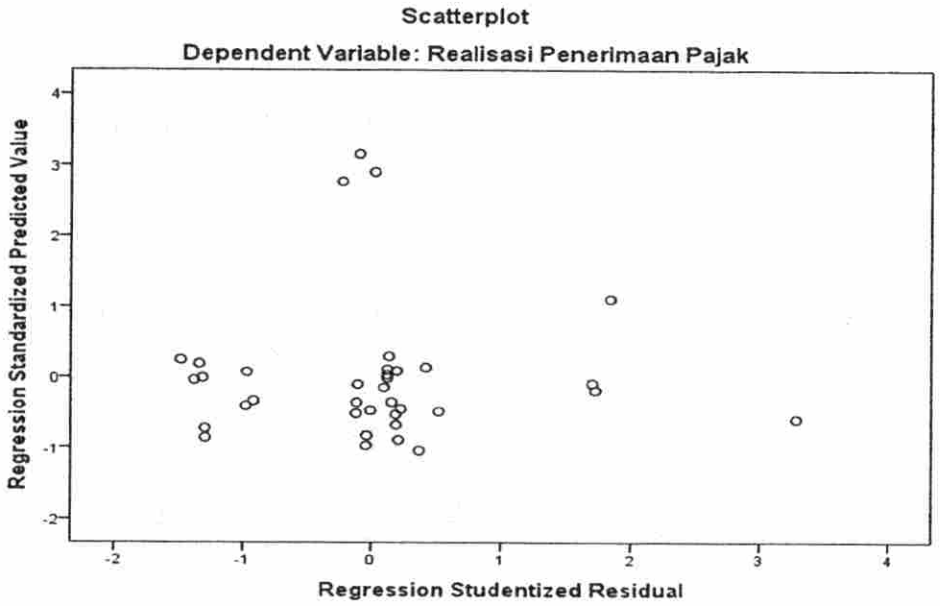

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan gambar IV.3 diatas antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas dari titik-titik menyebar diatas dan dibawah angaka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah masing-

masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel IV.8 sebagai berikut:

Tabel IV.8
Hasil Output SPSS
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

ıdel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2965387343,913	2033991160,769		1,458	,155		
SPT Badan diterima	1733599,530	1818080,697	,166	,954	,347	,997	1,003
WP Badan Terdaftar	2098973,754	10786933,039	,052	,195	,847	,430	2,327
WP Badan Efektif	397270,664	11397762,344	,009	,035	,972	,429	2,329

)ependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak
ıber: Hasil Pengolahan Data,2016

Berdasarkan tabel IV.8 hasil uji regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$

$Y = 2965387343{,}913 + 1733599{,}530 + 2098973{,}754 + 397270{,}664$

Persamaan regresi linear berganda ini mengandung arti bahwa:

a. Konstanta memiliki nilai sebesar 2965387343,913 ini menunjukan SPT Badan Diterima (X_1), Wajib Pajak Badan Terdaftar (X_2) dan Wajib Pajak Badan Efektif (X_3) nilainya adalah nol, maka realisasi penerimaan pajak memiliki nilai sebesar 2965387343,913

b. Koefisien regresi (X_1) sebesar 1733599,530 menyatakan bahwa setiap peningkatan SPT Badan Diterima sebesar 100%, maka hal ini akan menambah peningkatan realisasi penerimaan pajak sebesar 1733599,530 atau 18%.

c. Koefisien regresi (X_2) sebesar 2098973,754 menyatakan bahwa setiap peningkatan Wajib Pajak Badan Terdaftar sebesar 100%, maka hal ini akan menambah peningkatan realisasi penerimaan pajak sebesar 2098973,754 atau 21%.

d. Koefisien regresi (X_3) sebesar 397270,664 menyatakan bahwa setiap peningkatan Wajib Pajak Badan Efektif sebesar 100%, maka hal ini akan menambah peningkatan realisasi penerimaan pajak sebesar 397270,664 atau 40%.

2. Analisis Koefisien Determinasi

Untuk menjawab permasalahan berapa besar SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar, WP Badan Efektif terhadap Realisasi Penerimaan Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, maka dilakukan uji koefisien determinasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square.* Hasil perhitungan *Adjusted* R^2 dapat dilihat pada *output* model *summary* berikut ini:

Tabel IV.9
Hasil Output SPSS
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	S Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,174[a]	,030	,061	1664354377,23765	1,486

a. Predictors: (Constant), WP Badan Efektif, SPT Badan diterima, WP Badan Terdaftar
b. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak
Sumber: Hasil Pengolahan Data,2016

Berdasarkan tabel IV.9 output diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,061 atau 6,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar, WP Badan Efektif dan Realisasi Penerimaan Pajak adalah sebesar 6,1% sedangkan 93,9 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini yaitu Pemeriksaan Pajak,Tingkat Penghasilan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

3. Analisis Uji Hipotesis

a. Analisis Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Cara yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif terhadap Realisasi Penerimaan Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) dapat dilihat pada IV.10 sebagai berikut:

Tabel IV.10
Hasil Output SPSS
Uji Secara Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

del	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2965387343,913	2033991160,769		1,458	,155		
SPT Badan diterima	1733599,530	1818080,697	,166	,954	,347	,997	1,003
WP Badan Terdaftar	2098973,754	10786933,039	,052	,195	,847	,430	2,327
WP Badan Efektif	397270,664	11397762,344	,009	,035	,972	,429	2,329

Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak
ber: Hasil Pengolahan Data,2016

Berdasarkan tabel IV.10 hasil uji hipotesis secara regresi diketahui Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig} untuk SPT Badan Diterima sebesar 0,347, WP Badan Terdaftar sebesar 0,847 dan WP Badan Efektif sebesar 0,972

1) Pengujian Variabel SPT Badan Diterima (X_1)

Berdasarkan pengujian hipotesis didapat nilai t hitung 0,954 dengan tingkat signifikan sebesar 0,347 > 0,05. Nilai signifikan 0,347 berada di dalam daerah penerimaan Ho, sehingga Ha ditolak sedangkan Ho diterima. Ho diterima berarti dapat disimpulkan tidk ada hubungan yang signifikan antara SPT Badan Diterima dengan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk periode 2012-2014.

2) Pengujian WP Badan Terdaftar (X_2)

Berdasarkan pengujian hipotesis didapat nilai t hitung 0,195 dengan tingkat signifikan sebesar 0,847 > 0,05. Nilai signifikan t sebesar 0,847 berada di dalam daerah penerimaan Ho, sehingga Ha ditolak sedangkan Ho diterima. Ho diterima berarti dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara WP Badan Terdaftar dengan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk periode 2012-2014.

3) Pengujian WP Badan Efektif (X_3)

Berdasarkan pengujian hipotesis didapat nilai t hitung 0,035 dengan tingkat signifikan sebesar 0,972 > 0,05. Nilai signifikan t sebesar 0,972 berada di dalam daerah penerimaan Ho, sehingga Ha ditolak sedangkan Ho diterima. Ho diterima berarti dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara WP Badan Efektif dengan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk periode 2012-2014.

b. Analisis Uji Hipotesis Secaran Simultan (Uji f)

Pengujian hipotesi dalam penelitian ini adalah penyajian hipotesis secara bersama (Uji f). Untuk menjawab permasalahan pengaruh SPT

Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif terhadap Realisasi Penerimaan Pajak yang terdaftar di KPP Pratama KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, maka hasilnya di uji dengan menggunakan uji f yang dilakukan dengan menggunakan *Analysis of Varians* (ANNOVA). Hasil perhitungan untuk pengujian yang diolah menggunakan SPSS, dapat dilihat pada tabel IV.11 sebagai berikut:

Tabel IV.11
Hasil Output SPSS
Uji Secara Simultan (Uji f)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,755E+18	3	9,183E+17	,331	,803[b]
	Residual	8,864E+19	32	2,770E+18		
	Total	9,140E+19	35			

a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak
b. Predictors: (Constant), WP Badan Efektif, SPT Badan diterima, WP Badan Terdaftar
Sumber: Hasil Pengolahan Data,2016

Berdasarkan tabel IV.11 hasil uji hipotesis secara simultan diketahui nilai F_{tabel} untuk variabel independen SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif sebesar 0,331. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig} untuk variabel independen SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif sebesar 0,803.

Berdasarkan pengujian hipotesis nilai f hitung 0,331 dengan tingkat signifikan f sebesar 0,803 > 0,05 maka hipotesis Ha diterima maka dapat disimpulkan Pengaruh Jumlah SPT Badan Diterima,WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif tidak berpengaruh secara simultan

terhadap Realisasi Penerimaan Pajak. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini tidak sebanding dengan penlitian yang dilakukan oleh tresno indra dan wulan (2011) menyatakan bahwa penyampaian SPT dan peningkatan Wajib Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dipengaruhi faktor lain seperti: Pemeriksaan Pajak, Tingkat Penghasilan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyamapaian SPT.

4. Pengaruh Jumlah SPT Badan Diterima (X_1), WP Badan Terdaftar (X_2) dan WP Badan Efektif (X_3) Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Y)

a. Pengaruh Jumlah SPT Badan Diterima (X_1) Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Y)

Hasil penelitian ini dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukan bahwa secara parsial Jumlah SPT Badan Diterima tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberag Ulu. Hasil ini dibuktikan dengan nilai sebesar 0,347 > 0,05.. Nilai signifikan t sebesar 0,347 berada di dalam daerah penerimaan Ho, sehingga Ha ditolak sedangkan Ho diterima. Ho diterima berarti dapat disimpulkan bahwa SPT Badan Diterima tidak berpengaruh secarah parsial dengan Realisasi Penerimaan Pajak.

Hasil ini membuktikan dengan jumlah SPT Badan Diterima terhadap Realisasi Penerimaan Pajak hal ini tidak menjamin penerimaan

pajak meningkat. Hal ini tidak sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresno indra dan wulan (2011) Penyampaian SPT Badan Diterima mengindikasikan semakin tinggi penyampaian SPT akan kemungkinan semakin tinggi penerimaan pajak. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dikarenakan terjadinya krisis ekonomi global yang terjadi pada Negara-negara lain, masih banyak juga jumlah wajib pajak yang berstatus Non Efektif namun tidak melaporkan diri kepada kantor pajak, Tingkat Penghasilan wajib pajak yang tidak stabil juga mempengaruhi peningkatan setoran jumlah wajib pajak, dan juga masih terbatas jangkauan sosialisasi pajak terhadap wajib pajak potensial sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui tentang pajak yang ada saat ini, Pelayanan juga menjadi perhatian yang utama bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya masalah membayar pajak karena mereka beranggapan tidak ada penghargaan yang lebih dan timbal balik langsung kalau mereka membayar pajak.

b. Pengaruh WP Badan Terdaftar (X_2) Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Y)

Hasil penelitian ini dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukan bahwa secara parsial WP Badan Terdaftar Diterima tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberag Ulu. Hasil ini dibuktikan dengan nilai

sebesar 0,847 > 0,05. Nilai signifikan t sebesar 0,847 berada di dalam daerah penerimaan Ho, sehingga Ha ditolak sedangkan Ho diterima. Ho diterima berarti dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara WP Badan Terdaftar dengan Realisasi Penerimaan Pajak.

Dari Hasil ini membuktikan Wajib Pajak Badan Terdaftar tidak menjamin pengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hal ini tidak sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresno indra dan wulan (2011) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah Wajib pajak badan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dikarenakan terjadinya krisis ekonomi global yang terjadi pada Negara-negara lain, masih banyak juga jumlah wajib pajak yang berstatus Non Efektif namun tidak melaporkan diri kepada kantor pajak, Tingkat Penghasilan wajib pajak yang tidak stabil juga mempengaruhi peningkatan setoran jumlah wajib pajak, dan juga masih terbatas jangkauan sosialisasi pajak terhadap wajib pajak potensial sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui tentang pajak yang ada saat ini, Pelayanan juga menjadi perhatian yang utama bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya masalah membayar pajak karena mereka beranggapan tidak ada penghargaan yang lebih dan timbal balik langsung kalau mereka membayar pajak.

c. Pengaruh WP Badan Efektif (X_3) Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Y)

Hasil penelitian ini dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukan bahwa secara parsial WP Badan Efektif Diterima tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberag Ulu. Hasil ini dibuktikan dengan nilai sebesar 0,972 > 0,05.. Nilai signifikan t sebesar 0,972 berada di dalam daerah penerimaan Ho, sehingga Ha ditolak sedangkan Ho diterima. Ho diterima berarti dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara WP Badan Efektif dengan Realisasi Penerimaan Pajak.

Dari Hasil ini membuktikan Wajib Pajak Badan Efektif tidak menjamin pengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hal ini tidak sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresno indra dan wulan (2011) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah Wajib pajak badan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dikarenakan terjadinya krisis ekonomi global yang terjadi pada Negara-negara lain, masih banyak juga jumlah wajib pajak yang berstatus Non Efektif namun tidak melaporkan diri kepada kantor pajak, Tingkat Penghasilan wajib pajak yang tidak stabil juga mempengaruhi peningkatan setoran jumlah wajib pajak, dan juga masih terbatas jangkauan sosialisasi pajak terhadap wajib pajak potensial sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui tentang pajak

yang ada saat ini, Pelayanan juga menjadi perhatian yang utama bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya masalah membayar pajak karena mereka beranggapan tidak ada penghargaan yang lebih dan timbale balik langsung kalau mereka membayar pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian pada bab 4, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis secara parsial membuktikan bahwa variabel SPT Badan Diterima WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif tidak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

2. Hasil pengujian hipotesis membuktikan secara simultan bahwa variabel SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif tidak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak yan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Berdasarkan pengujian hipotesis nilai f hitung 0,331 dengan tingkat signifikan f sebesar 0,803 > 0,05 maka hipotesis Ha diterima maka dapat disimpulkan Pengaruh Jumlah SPT Badan Diterima,WP Badan Terdaftar dan WP Badan Efektif tidak berpengaruh secara simultan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

   Disarankan bagi kantor pajak hendaknya membantu dalam menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan pajak sehingga Wajib Pajak mengetahui informasi tersebut secara cepat, tepat dan efisien. Sehingga semua wajib pajak yang terdaftar bisa tepat waktu menyampaikan SPTnya dan melakukan sosialisasi secara intensif sehingga Wajib Pajak Badan Efektif bisa lebih efektif lagi dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPTnya dan diharapkan dengan diadakan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak Efektif dari tahun ke tahun di Kantor Pelayana Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

2. Penlitian Selanjutnya

   Bagi para penelitian lain yang ingin melakukan penelitian sejenis,hendaknya melakukan tinjauan penelitian terhadap faktor lain seperti, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam ketepatan penyampaian SPTnya kepada KPP karena tingkat kepatuhan juga bisa diukur dengan tepatnnya WP Badan dalam Penyampaian SPT sesuian dengan ketetapans yang berlaku. Sehingga dapat memberikan masukan dan tambahan dalam perkembangan ilmu akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad komara. (2012). Cara mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jakarta : Penerbit Bee Media Indonesia.

Euphrasia Susy Suhendra. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan" Jurnal Ekonomi Bisnis No.1 Vol 15 April 2010.

Eviany, sri dan Amirudin Jauhari. "Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Merespon Surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan" Jurnal Perpajakan I Vol. 3 No.1 Desember 2014.

Fidel.(2010). Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19", Edisi Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Herry Purwono.(2010). Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Husein Umar. (2011). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Herman, Eveline. "Undang-Undang Perpajakan 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" Erlangga, Jakarta, 2008..

Mardiasmo, "Perpajakan" Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2009.

Siti Resmi. (2009) Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sugiyono.(2009) Metode Penelitian Bisnis.Bandung : Penerbit CV. Alfabeta.

Sugiyono.(2013) Statistika Untuk Penelitian.Bandung : Penerbit CV. Alfabeta.

Tresno, Indra dan Wulan. "Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan Penyampaian SPT Masa PPH Badan dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan" Universitas Negeri Jakarta 2011.

Waluyo, "Perpajakan Indonesia", Salemba Empat, Jakarta, 2009.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI — Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1) — Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) — Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3) — Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

npalembang.net/feump — Email : feumplg@gmail.com

nat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

ari / Tanggal : Selasa, 22 Maret 2016

aktu : 13.00 s/d 18.00 WIB

ama : Harie Mulkan

M : 22 2012 258

ogram Studi : Akuntansi

ata Kuliah Pokok : Perpajakan

dul Skripsi : PENGARUH JUMLAH SPT BADAN DITERIMA WP BADAN TERDAFTAR DAN WP BADAN EFEKTIF TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
	Betri Sirajuddin S.E, Ak., M.Si., CA	Pembimbing	31/3/2016	
	Betri Sirajuddin S.E, Ak., M.Si., CA	Ketua Penguji	31/3/2016	
	Nina Sabrina, S.E, M.Si	Penguji I	30/Mar-2016	
	Aprianto, S.E., M.Si	Penguji II	28/3/2016	

Palembang, Maret 2016
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghozali,SE.Ak.M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021960

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

IA MAHASISWA :	Harie Mulkan	PEMBIMBING	
:	22 2012 258	KETUA	Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA
GRAM STUDI :	Akuntansi	ANGGOTA :	
UL SKRIPSI :	PENGARUH JUMLAH SPT BADAN DITERIMA, WP BADAN TERDAFTAR DAN WP BADAN EFEKTIF TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU		

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
5/2	Bab I + 3			
7/2	Bab 4			
15/2	Bab 4			
17/2	Bab 4			
20/2	Bab 4			
25/2	Bab 4			
27/2	Bab 5			
3/3	Bab 1-5/DP			ACC

ATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi. 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal / /

a.n. Dekan

Program Studi

Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jalan Tasik Kambang Iwak, Palembang 30135
Telepon (0711) 357077, 315288, 312395 ; Faksimili (0711) 313119

Nomor : S- 3786 /WPJ.03/2015 — 10 Desember 2015
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Set
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Kepala KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 59
Palembang

Sehubungan dengan surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang, nomor 966/H-5/FEB-UMP/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 hal Izin Survei / Pengambilan Data yang Saudara setujui atas :

Nama/NPM : Harie Mulkan / 22.2012.258
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah SPT Badan Diterima, WP Badan Terdaftar Dan WP Badan Efektif Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

dengan ini Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan ~~Magang/Penyebaran Kuisioner~~/Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor

Samon Jaya
NIP 196707281993101001

KP.: BD.05/BD.0501

Jadwal Penelitian

Keterangan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Survei Pendahuluan																							
Laporan Survei Pendahuluan																							
Proposal																							
Semiinar Proposal																							
Revisi Seminar																							
Pengambilan Data																							
Pengolahan Data Analisis																							
Hasil Penelitian																							
Penggadaan Penelitian																							
Ujian Komprehensif																							
Perbaikan Skripsi																							

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA	:	**HARIE MULKAN**
NIM	:	**222012258**
PROGRAM STUDI	:	**Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 12/فبراير/٢٠١٦
an. Dekan
Wakil Dekan IV

Drs. Antoni, M.H.I.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Harie Mulkan
Place/Date of Birth	:	Lubuklinggau, April 26th 1994
Test Times Taken	:	+2
Test Date	:	February, 4th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension	:	49
Structure Grammar	:	42
Reading Comprehension	:	42
OVERALL SCORE	:	443

Palembang, February, 11th 2016
Head of Language Institute

LEMBAGA BAHASA
Univ. Muhammadiyah Palembang
Utini Susanti, S.Pd.,M.A
NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 141/TEA FE/LB/UMP/II/2016

123 certificates

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

بسم الله الرحمن الرحيم

PIAGAM

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama	: HARIE MULKAN
Nomor Pokok Mahasiswa	: 222012258
Fakultas	: EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir	: LUBUK LINGGAU, 26-04-1994

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa	: Durian Gadis
Kecamatan	: Rambutan
Kota/Kabupaten	: Banyuasin
Dinyatakan	: Lulus

Palembang, 30 September 2015

Mengetahui
Rektor,

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.

Ketua LPKKN,

Ir. Alhanannasir, M.Si.

BIODATA PENULIS

Nama	: Harie Mulkan
NIM	: 22 2012 258
Tempat/ Tanaggal Lahir	: Lubuk Linggau, 26 April 1994
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jl. Mahameru Kampoeng Palem Plaju Palembang
No. HP	: 0812 7470 8866
Email	: Harie_mulkan@ymail.com
Nama Orang Tua	
Ayah	: M. Arief Mulkan
Ibu	: Hoiriah
Alamat Orang Tua	: Jl. Bangau No.39 Keputraan Kota Lubuk Linggau

Palembang, 2016

Penulis,

(Harie Mulkan)

```
Warning # 849 in column 23.  Text: in_ID
The LOCALE subcommand of the SET command has an invalid parameter.  It could
not be mapped to a valid backend locale.
REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SRESID)
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
  /SAVE RESID.
```

Regression

```
[DataSet1] D:\Untitled1ddddd.sav
```

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Realisasi Penerimaan Pajak	2406316167,4722	1615966667,11299	36
SPT Badan diterima	71,2778	154,97495	36
WP Badan Terdaftar	283,5278	39,78692	36
WP Badan Efektif	220,3056	37,66834	36

Correlations

		Realisasi Penerimaan Pajak	SPT Badan diterima	WP Badan Terdaftar	WP Badan Efektif
Pearson Correlation	Realisasi Penerimaan Pajak	1,000	,163	-,051	-,039
	SPT Badan diterima	,163	1,000	,047	,054
	WP Badan Terdaftar	-,051	,047	1,000	,755
	WP Badan Efektif	-,039	,054	,755	1,000
Sig. (1-tailed)	Realisasi Penerimaan Pajak	.	,171	,384	,410
	SPT Badan diterima	,171	.	,392	,376
	WP Badan Terdaftar	,384	,392	.	,000
	WP Badan Efektif	,410	,376	,000	.
N	Realisasi Penerimaan Pajak	36	36	36	36
	SPT Badan diterima	36	36	36	36
	WP Badan Terdaftar	36	36	36	36
	WP Badan Efektif	36	36	36	36

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	WP Badan Efektif, SPT Badan diterima, WP Badan Terdaftar[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak
b. All requested variables entered.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,174[a]	,030	-,061	1664354377,23765	1,486

a. Predictors: (Constant), WP Badan Efektif, SPT Badan diterima, WP Badan Terdaftar
b. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak

ANOVA[a]

Model		*Sum of Squares*	*Df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
1	*Regression*	*2,755E+18*	*3*	*9,183E+17*	*,331*	*,803[b]*
	Residual	*8,864E+19*	*32*	*2,770E+18*		
	Total	*9,140E+19*	*35*			

a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak
b. Predictors: (Constant), WP Badan Efektif, SPT Badan diterima, WP Badan Terdaftar

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2965387343,913	2033991160,769		1,458	,155		
	SPT Badan diterima	1733599,530	1818080,697	,166	,954	,347	,997	1,003
	WP Badan Terdaftar	2098973,754	10786933,039	,052	,195	,847	,430	2,327
	WP Badan Efektif	397270,664	11397762,344	,009	,035	,972	,429	2,329

. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	SPT Badan diterima	WP Badan Terdaftar	WP Badan Efektif
	1	3,223	1,000	,00	,03	,00	,00
	2	,757	2,063	,00	,97	,00	,00
	3	,014	14,981	,79	,00	,02	,30
	4	,005	24,869	,21	,00	,98	,70

. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2113196928,0000	3292857600,0000	2406316167,4722	280549137,31797	36
Std. Predicted Value	-1,045	3,160	,000	1,000	36
Standard Error of Predicted Value	314696224,000	978857088,000	521590142,336	191704833,768	36
Adjusted Predicted Value	1927999104,0000	3357158912,0000	2414201983,0428	323980544,12946	36
Residual	-2288076800,00000	5312175104,00000	,00000	1591427174,19630	36
Std. Residual	-1,375	3,192	,000	,956	36
Stud. Residual	-1,481	3,284	-,002	,996	36
Deleted Residual	-2657003520,00000	5623247872,00000	-7885815,57061	1728512292,53151	36
Stud. Deleted Residual	-1,511	3,969	,018	1,078	36
Mahal. Distance	,279	11,134	2,917	3,125	36
Cook's Distance	,000	,158	,021	,038	36
Centered Leverage Value	,008	,318	,083	,089	36

a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak

Charts

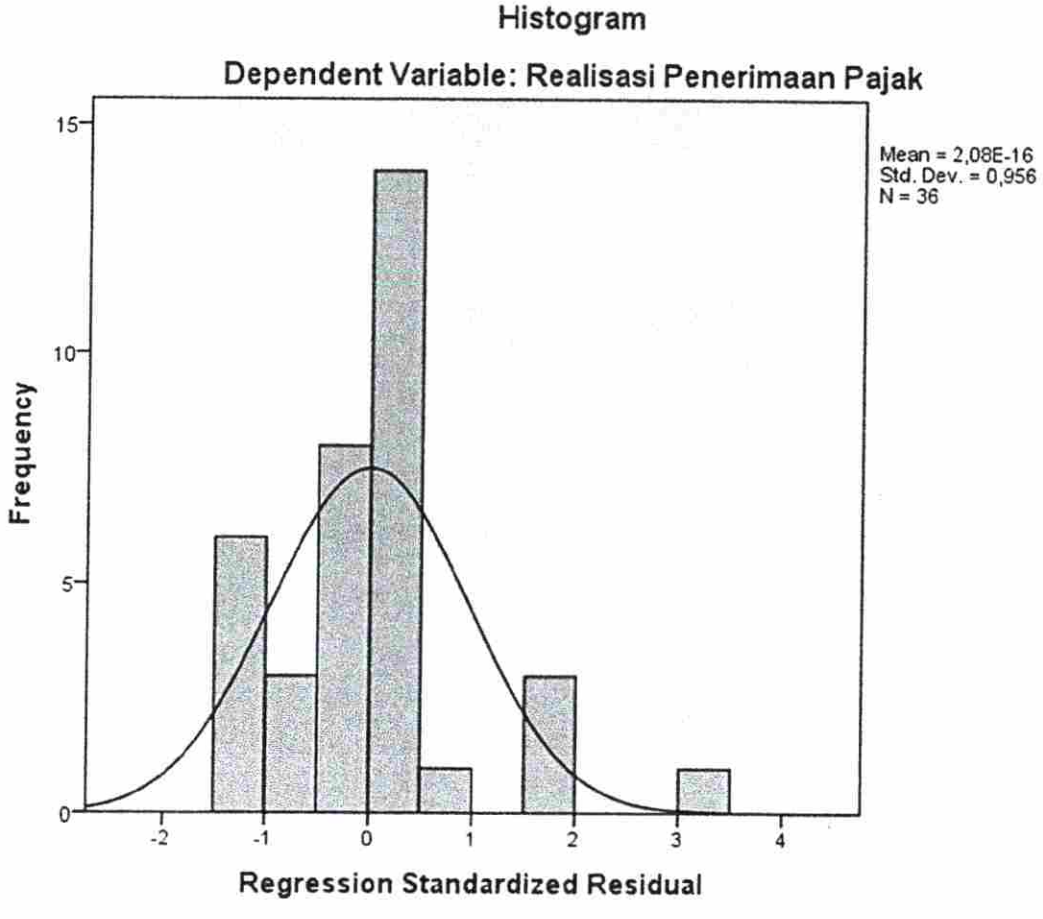

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak

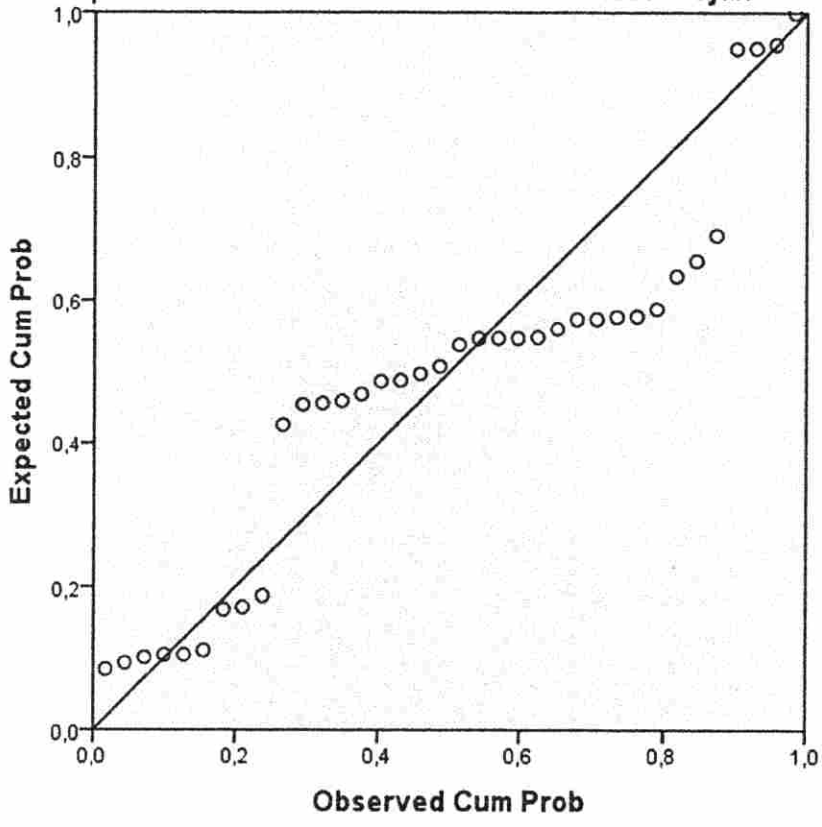

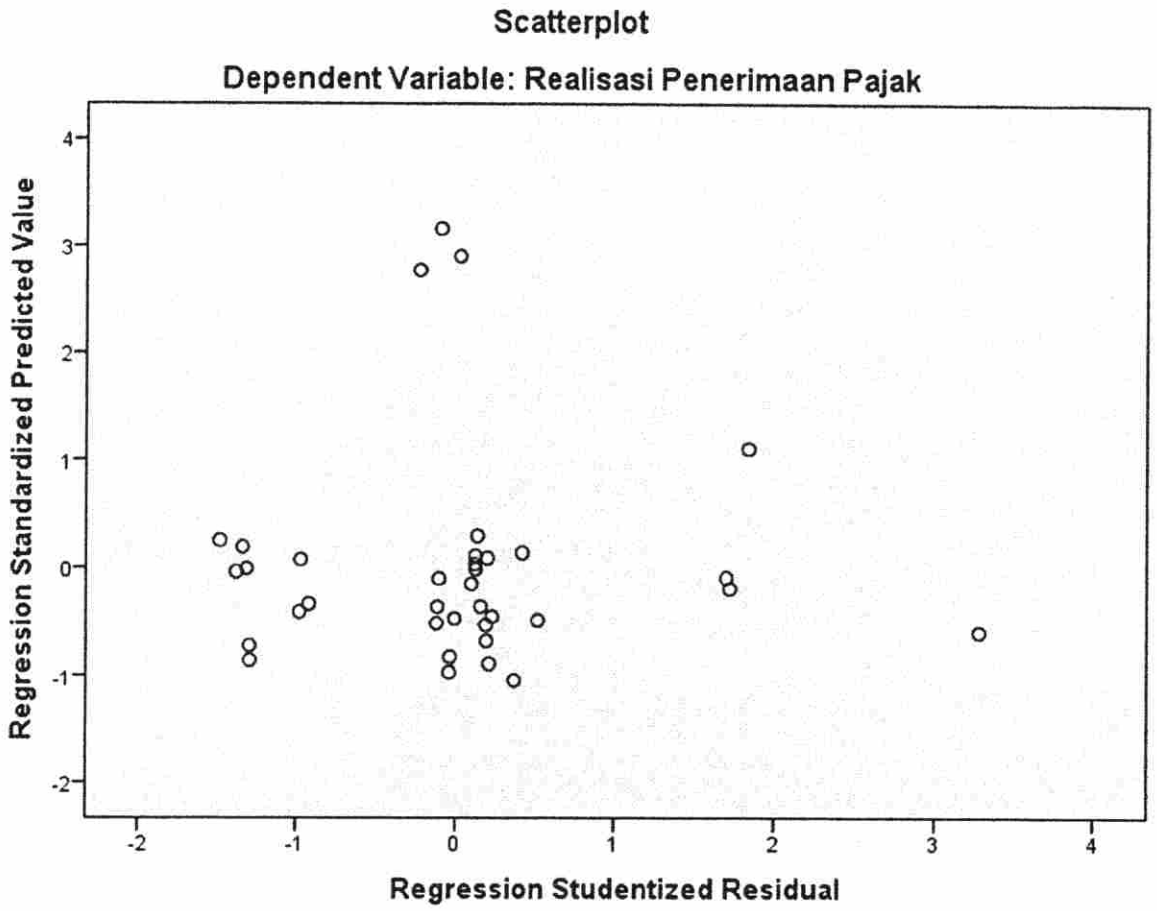
Scatterplot
Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak
Regression Standardized Predicted Value
Regression Studentized Residual
4
3
2
1
0
-1
-2
-2
-1
0
1
2
3
4